



Implementasi Kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Kebun Bunga 6 Banjarmasin

**Uswatun Hasanah¹, Shofia Rahmi², Dwi Agus Pratiwi³, Aulia Rahman⁴, Muhammad Adha
Aulia Akbar⁵, Nuryadin⁶**

¹²³⁴⁵⁶UIN Antasari Banjarmasin

¹us.wtnhsnh2520@gmail.com

²shofiarahmi55@gmail.com

³dwiap5200@gmail.com

⁴aularhmnnn098@gmail.com

⁵m.adhauliakbar@gmail.com

⁶nuryadin@uin-antasari.ac.id

Abstract

This research is motivated by the policy change in new student admissions to the New Student Admission System (SPMB), which is implemented online to create educational equity and transparency in school admissions. This study aims to examine the implementation of the New Student Admission System (SPMB) policy at SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Using a descriptive qualitative approach, this research empirically traces the policy implementation process to gain a comprehensive understanding of the implementation practices as well as the various factors influencing the effectiveness of its application within the school environment. Research data were obtained through interviews, observations, and documentation involving parties related to the SPMB implementation. The results show that the implementation of the SPMB policy at SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin has been carried out in accordance with the regulations of the Education Office through an online system with domicile, affirmative action, and transfer pathways. In its implementation, the school faces several obstacles, such as competition with private schools, limited facilities and infrastructure, and low public interest in certain public schools. Furthermore, the implementation of the second wave of student admissions is still considered to have the potential to create disparities in student distribution. In an effort to overcome the various obstacles encountered, the school authorities has implemented a number of strategies, including conducting outreach to kindergarten institutions, disseminating information through brochures, organizing the Rajabiyah Week activities, and establishing partnerships with various kindergartens around the school environment. Based on the research findings, the implementation of the New Student Admission System (SPMB) policy at SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin can be said to have been carried out quite effectively. However, various improvements and support from all stakeholders are still needed so that the goal of equitable access to education can be realized more optimally.

Keywords: Policy Implementation, New Student Admission System (SPMB), Education Policy, Equitable Access to Education, Elementary School.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan penerimaan peserta didik baru menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan secara daring untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan transparansi dalam penerimaan murid di sekolah. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menelusuri proses pelaksanaan kebijakan secara empiris guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik implementasi serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya di lingkungan sekolah. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi yang melibatkan pihak-pihak terkait penyelenggaraan SPMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari Dinas Pendidikan melalui sistem daring dengan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Dalam pelaksanaannya, sekolah menghadapi beberapa kendala, seperti persaingan dengan sekolah swasta, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri tertentu. Selain itu, pelaksanaan gelombang kedua penerimaan murid dinilai masih berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pemerataan peserta didik. Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, pihak sekolah menerapkan sejumlah strategi, antara lain melakukan sosialisasi ke lembaga taman kanak-kanak, menyebarluaskan informasi melalui brosur, menyelenggarakan kegiatan Pekan Rajabiyah, serta menjalin kemitraan dengan berbagai TK yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin dapat dikatakan telah berlangsung dengan cukup efektif. Namun, masih diperlukan berbagai penyempurnaan serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar tujuan pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan secara lebih maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Kebijakan Pendidikan, Pemerataan Akses Pendidikan, Sekolah Dasar.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana penting untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan manusia agar dapat berkembang secara optimal serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan sosial (Rohmah, 2020). Pendidikan juga bertujuan membentuk kepercayaan diri, menumbuhkan keingintahuan, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu (Zen, 2017). Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, pendidikan menjadi kebutuhan mendasar yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membentuk karakter individu agar mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Rusdiana, 2015). Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berperan dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Negara-negara yang telah berkembang maupun yang maju pada umumnya menempatkan sektor pendidikan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Muhardi, 2004). Pentingnya pendidikan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Namun demikian, sistem

pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks, antara lain distribusi satuan pendidikan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya kesenjangan mutu antarlembaga pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan, pemerintah melakukan pembaruan kebijakan pada sistem penerimaan peserta didik. Sistem yang sebelumnya dikenal sebagai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengalami perubahan menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. SPMB dirancang sebagai penyempurnaan kebijakan sebelumnya dengan menekankan prinsip pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, dan kohesivitas sosial. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada calon murid dalam memperoleh layanan pendidikan sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik masih menghadapi berbagai persoalan. Putra et al. menemukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik PPDB pada sekolah dasar di Kabupaten Badung belum berjalan optimal. Permasalahan yang ditemukan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran daring, kendala administrasi, serta keterbatasan daya tampung sekolah. Penelitian Kussetyaningsih (2020) juga menunjukkan bahwa implementasi PPDB berbasis zonasi di Kota Yogyakarta secara teknis dapat berjalan dengan baik karena didukung sistem daring dan petunjuk teknis yang jelas, tetapi masih terdapat hambatan berupa kurangnya sosialisasi, permasalahan administrasi, dan persebaran sekolah yang belum merata. Sementara itu, penelitian mengenai perspektif orang tua dalam memilih sekolah dasar menunjukkan bahwa keputusan orang tua tidak hanya berkaitan dengan ketentuan zonasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kebijakan, persepsi terhadap sekolah, serta pertimbangan mengenai kualitas sekolah.

Kajian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan belum sepenuhnya terselesaikan melalui kebijakan penerimaan murid. Evaluasi SPMB tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan SPMB diarahkan untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan, tetapi implementasinya masih perlu memperhatikan perbedaan kondisi daerah, kesiapan infrastruktur digital, kesesuaian regulasi daerah, serta persepsi masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Penelitian Santoso et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik perlu dilihat tidak hanya dari aspek prosedur penerimaan, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penerimaan murid tidak cukup diukur berdasarkan terlaksananya proses pendaftaran, tetapi juga perlu dilihat dari kondisi implementasi pada tingkat satuan pendidikan serta dampaknya terhadap pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak membahas implementasi PPDB, sebagian besar kajian masih berfokus pada sistem zonasi atau jalur tertentu pada jenjang SMP dan SMA, serta pada wilayah atau kebijakan sebelum perubahan PPDB menjadi SPMB. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi SPMB pada tingkat sekolah dasar dengan melihat kondisi faktual sekolah, kendala pelaksanaan pendaftaran daring, pemahaman orang tua, persaingan antarsekolah, serta strategi sekolah dalam meningkatkan minat masyarakat masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai implementasi SPMB pada tingkat satuan pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi lokal karena karakteristik masyarakat, kualitas sekolah, ketersediaan fasilitas, dan tingkat pemahaman teknologi dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa keterbatasan kajian empiris mengenai bagaimana kebijakan SPMB yang relatif baru tersebut diimplementasikan secara langsung pada

tingkat sekolah dasar dan bagaimana sekolah merespons berbagai persoalan yang muncul dalam proses penerimaan murid.

Kondisi tersebut relevan dengan pelaksanaan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak sekolah, proses pendaftaran dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi dengan Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaannya, calon murid diwajibkan mengunggah sejumlah dokumen administrasi, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan lulus dari taman kanak-kanak sebagai bagian dari proses verifikasi data. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai hambatan, terutama terkait pemahaman orang tua terhadap prosedur pendaftaran secara daring. Kesalahan dalam pengisian data, proses unggah dokumen, serta kurangnya pemahaman mengenai tahapan pendaftaran sering kali menjadi kendala yang menghambat kelancaran proses penerimaan murid baru.

Selain kendala teknis, persaingan antar sekolah juga menjadi tantangan tersendiri bagi SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Banyak orang tua menunjukkan preferensi untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang dipersepsikan memiliki kualitas pendidikan lebih baik, baik sekolah negeri yang dianggap unggulan maupun sekolah swasta berbasis yayasan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa sekolah mengalami kelebihan jumlah pendaftar, sedangkan sekolah lainnya masih menghadapi kekurangan murid. Persaingan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas sarana dan prasarana, program unggulan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta citra atau branding sekolah di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan murid tidak dapat dilepaskan dari persepsi masyarakat terhadap kualitas dan daya tarik masing-masing sekolah.

Hasil wawancara awal juga menunjukkan bahwa pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Upaya tersebut antara lain melalui kegiatan sosialisasi SPMB, penyebaran brosur ke taman kanak-kanak, pelaksanaan kegiatan perlombaan antarsiswa TK, serta pengenalan program dan visi sekolah kepada masyarakat. Meskipun demikian, sekolah masih menghadapi kendala dalam menarik minat calon murid karena adanya persaingan yang cukup ketat dengan sekolah lain yang dinilai lebih unggul dari segi fasilitas maupun program pendidikan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk memberikan akses pendidikan yang adil dengan realitas pilihan masyarakat dan kondisi persaingan antarsekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajiannya terhadap implementasi SPMB pada tingkat sekolah dasar, khususnya di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin, dengan mengintegrasikan tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu pelaksanaan mekanisme SPMB, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta strategi sekolah dalam merespons persaingan dan meningkatkan minat masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat SPMB sebagai prosedur administratif penerimaan murid, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks nyata satuan pendidikan dan bagaimana kondisi lokal sekolah memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya pada masa transisi dari PPDB menuju SPMB.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan SPMB, mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekolah, serta menganalisis upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan

pemerataan akses dan daya tarik sekolah bagi masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi kebijakan SPMB pada tingkat sekolah dasar. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam memperbaiki pelaksanaan SPMB agar lebih efektif, transparan, adaptif terhadap kondisi masyarakat, serta mampu mendukung pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena, proses pelaksanaan, kendala, serta upaya sekolah dalam menjalankan kebijakan SPMB secara sistematis dan faktual. Fokus penelitian ini diarahkan pada implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Adapun aspek yang diteliti meliputi pelaksanaan kebijakan SPMB, sistem jalur penerimaan murid baru, kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan SPMB, persaingan sekolah negeri dengan sekolah swasta, strategi sekolah dalam menarik minat masyarakat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di SDN Kebun Bunga 6 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 Komplek UIN Antasari, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan sekolah ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa SDN Kebun Bunga 6 merupakan salah satu sekolah negeri yang melaksanakan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sehingga dapat memberikan data dan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Pelaksana SPMB, karena informan tersebut terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan penyelesaian berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru. Selain informan utama, penelitian ini melibatkan Kepala Sekolah sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pelaksanaan SPMB pada tingkat sekolah. Penelitian ini juga melibatkan orang tua calon murid atau orang tua murid sebagai informan pendukung untuk memperoleh perspektif pengguna layanan mengenai pemahaman terhadap mekanisme SPMB, pengalaman mengikuti proses pendaftaran, kendala yang dihadapi, serta pertimbangan dalam memilih SDN Kebun Bunga 6. Apabila diperlukan, guru yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB dapat dijadikan informan tambahan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan teknis kebijakan di lingkungan sekolah.

Pemilihan beberapa informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari perspektif yang berbeda sehingga data tidak hanya berasal dari pihak pelaksana kebijakan. Ketua Pelaksana SPMB memberikan informasi mengenai pelaksanaan teknis dan administratif, Kepala Sekolah memberikan informasi mengenai kebijakan dan evaluasi pada tingkat sekolah, sedangkan orang tua memberikan informasi mengenai pengalaman dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan SPMB. Perbedaan posisi dan pengalaman tersebut memungkinkan peneliti melakukan perbandingan informasi sehingga diperoleh gambaran implementasi SPMB yang lebih utuh. Informan ditentukan berdasarkan relevansi informasi yang dimiliki terhadap fokus penelitian dan proses pengumpulan data dapat dihentikan apabila informasi yang diperoleh telah mencapai

kondisi jenuh, yaitu ketika data yang diperoleh tidak lagi memberikan informasi baru yang relevan dengan fokus penelitian.

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sekolah dasar negeri. Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup pelaksanaan sistem penerimaan murid baru berbasis domisili, mekanisme jalur penerimaan, kendala teknis dan administratif, strategi sekolah dalam meningkatkan jumlah peserta didik, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan SPMB di lingkungan sekolah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sekolah dan pelaksanaan kegiatan SPMB secara langsung. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada Ketua Pelaksana SPMB, Kepala Sekolah, serta orang tua calon murid atau orang tua murid. Wawancara dengan Ketua Pelaksana SPMB diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, administrasi, kendala teknis, dan strategi sekolah dalam menjalankan SPMB. Wawancara dengan Kepala Sekolah dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan sekolah, pengawasan, pengambilan keputusan, serta evaluasi pelaksanaan SPMB. Sementara itu, wawancara dengan orang tua dilakukan untuk mengetahui pemahaman, pengalaman, kendala, dan pertimbangan masyarakat dalam mengikuti proses SPMB serta memilih sekolah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa profil sekolah, arsip sekolah, dokumen penerimaan murid baru, brosur penerimaan murid baru, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data penelitian. Selain itu, digunakan pula alat bantu penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, alat tulis, telepon genggam untuk merekam hasil wawancara, serta dokumen pendukung lainnya. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian sehingga pertanyaan yang diajukan kepada setiap informan tetap berkaitan dengan aspek implementasi SPMB yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif sehingga hubungan antar temuan dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul selama proses analisis untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Ketua Pelaksana SPMB, Kepala Sekolah, dan orang tua calon murid atau orang tua murid. Sebagai contoh, informasi mengenai mekanisme dan kendala pelaksanaan SPMB yang diperoleh dari Ketua Pelaksana SPMB dibandingkan dengan penjelasan Kepala Sekolah dan pengalaman orang tua sebagai pengguna layanan. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi dan pengecekan kembali kepada informan serta menyesuaikannya dengan bukti dokumentasi yang tersedia. Penggunaan triangulasi sumber

dan teknik tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan bahwa hasil penelitian menggambarkan kondisi implementasi SPMB berdasarkan berbagai perspektif (Sugiyono, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin telah menerapkan sistem penerimaan secara daring sesuai kebijakan dari Dinas Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pelaksana SPMB, pelaksanaan kebijakan ini merupakan perubahan dari sistem sebelumnya yang dikenal sebagai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Perubahan istilah tersebut mengikuti kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengganti istilah “peserta didik” menjadi “murid”. Penerapan sistem daring dilakukan melalui aplikasi khusus SPMB yang terhubung langsung dengan Dinas Pendidikan. Sistem tersebut digunakan untuk mengunggah dan memverifikasi dokumen persyaratan calon murid, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan lulus dari taman kanak-kanak. Dalam pelaksanaannya terdapat dua pengguna (user) utama, yaitu pihak Dinas Pendidikan sebagai verifikator dan pihak sekolah sebagai pelaksana teknis di satuan pendidikan.

Pelaksanaan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin terdiri atas berbagai jalur penerimaan yang meliputi domisili, afirmasi, serta mutasi. Jalur domisili merupakan jalur penerimaan berdasarkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, calon murid yang dapat diterima melalui jalur ini adalah mereka yang berdomisili maksimal 3 kilometer dari sekolah. Sistem secara otomatis akan menolak pendaftaran apabila jarak tempat tinggal melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain jalur domisili, terdapat jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Jalur ini dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau dokumen pendukung lainnya. Sekolah menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus tetap memiliki hak yang sama untuk diterima di sekolah negeri sesuai kebijakan pemerintah, meskipun sekolah belum memiliki layanan pendidikan inklusi secara khusus.

Jalur berikutnya adalah jalur mutasi yang diperuntukkan bagi calon murid yang orang tuanya bekerja di sekitar lingkungan sekolah. Jalur ini umumnya digunakan oleh anak dari pegawai atau pekerja yang memiliki hubungan kerja di wilayah sekitar sekolah, seperti dosen atau pegawai instansi pemerintah di kawasan sekitar SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Dalam pelaksanaannya, sekolah juga menerapkan pembagian kuota penerimaan murid berdasarkan jalur yang tersedia. SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin menargetkan penerimaan sebanyak dua rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 56 murid. Dari jumlah tersebut, sebagian besar kuota dialokasikan untuk jalur domisili, sedangkan sisanya untuk jalur afirmasi dan mutasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis daring memberikan dampak positif terhadap pemerataan peserta didik di berbagai sekolah. Sistem tersebut dinilai lebih terstruktur, transparan, serta mampu mengurangi terjadinya penumpukan peserta didik pada sekolah tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, terutama ketika dibuka gelombang kedua penerimaan yang tidak lagi menggunakan sistem jalur secara penuh. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dan peluang terjadinya praktik nepotisme dalam penerimaan murid baru.

Selain itu, persaingan antara sekolah negeri dan sekolah swasta juga menjadi tantangan tersendiri bagi SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara, banyak orang tua lebih memilih sekolah swasta karena dianggap memiliki fasilitas, program, dan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. Sekolah swasta juga dinilai lebih unggul dalam kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan sumber daya guru, serta sarana dan prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah, pihak SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, seperti pembagian brosur, presentasi ke taman kanak-kanak, pelaksanaan kegiatan Pekan Rajabiyah, serta pemberian potongan biaya atribut sekolah bagi pendaftar awal. Namun demikian, hasil yang diperoleh belum maksimal karena sebagian besar calon murid telah lebih dahulu didaftarkan ke sekolah swasta sebelum jadwal resmi SPMB dibuka. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin telah berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui sistem daring dengan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti persaingan dengan sekolah swasta, keterbatasan sarana dan prasarana, serta potensi ketimpangan pada pelaksanaan gelombang kedua penerimaan murid baru.

3.2 Pembahasan

Implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui sistem penerimaan berbasis daring dan pembagian jalur penerimaan. Pelaksanaan tersebut memberikan perubahan positif terutama dalam aspek keteraturan dan transparansi proses penerimaan murid. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi SPMB belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemerataan pendidikan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya perbedaan minat masyarakat terhadap sekolah, persaingan dengan sekolah swasta, kendala pemahaman orang tua terhadap mekanisme pendaftaran daring, serta ketimpangan jumlah calon murid antar sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya prosedur administratif, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan substantifnya.

Untuk menganalisis kondisi tersebut secara lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2021), yang terdiri atas enam aspek, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta disposisi implementor. Keenam aspek tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada aspek standar dan sasaran kebijakan, pelaksanaan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin telah mengacu pada ketentuan pemerintah mengenai jalur penerimaan murid, yaitu jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Kejelasan aturan tersebut memberikan pedoman bagi pihak sekolah dalam menjalankan proses penerimaan murid secara terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tingkat prosedural, implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun, apabila dikaitkan dengan sasaran kebijakan yang lebih luas, yaitu pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung memilih sekolah tertentu yang

dianggap lebih unggul dari segi fasilitas, program, dan kualitas pendidikan. Akibatnya, terdapat sekolah yang memperoleh jumlah pendaftar lebih banyak, sedangkan sekolah lainnya menghadapi kekurangan murid. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kepatuhan terhadap standar kebijakan dengan pencapaian sasaran kebijakan. Dengan kata lain, sekolah telah melaksanakan mekanisme SPMB sesuai aturan, tetapi pelaksanaan prosedur tersebut belum secara otomatis menghilangkan ketimpangan preferensi masyarakat antarsekolah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa standar penerimaan murid perlu didukung oleh pemerataan kualitas sekolah. Kebijakan penerimaan hanya mengatur mekanisme akses, sedangkan keputusan masyarakat dalam memilih sekolah juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap mutu sekolah. Oleh karena itu, pencapaian sasaran pemerataan pendidikan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya mengatur proses penerimaan, tetapi juga memperkuat kualitas dan daya tarik sekolah secara lebih merata.

b. Sumber Daya

Pada aspek sumber daya, pelaksanaan SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas kepala sekolah, guru, operator sekolah, serta masyarakat khususnya orang tua. Sekolah juga didukung oleh fasilitas berupa komputer, jaringan internet, dan sistem administrasi yang digunakan dalam proses pendaftaran serta verifikasi data. Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan sekolah melaksanakan SPMB secara daring sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya secara fisik belum sepenuhnya menjamin kelancaran implementasi. Kendala masih ditemukan pada sisi kemampuan sebagian orang tua dalam memahami proses pendaftaran daring, khususnya dalam pengisian data dan pengunggahan dokumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya berupa fasilitas dan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan manusia yang berinteraksi dengan kebijakan.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun perangkat pelaksana telah tersedia. Sekolah pada akhirnya harus memberikan pendampingan kepada orang tua agar prosedur yang telah dirancang pemerintah dapat dilaksanakan dengan benar. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa kesiapan teknologi perlu diikuti dengan peningkatan literasi digital dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Hal ini penting karena sistem yang secara administratif dianggap sederhana bagi pelaksana belum tentu mudah dipahami oleh seluruh pengguna layanan.

c. Hubungan Antarorganisasi

Pelaksanaan SPMB melibatkan hubungan antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan masyarakat. Hubungan tersebut terlihat melalui penyampaian informasi, sosialisasi prosedur, proses pendaftaran, serta verifikasi data calon murid. Koordinasi antar pihak menjadi bagian penting karena sekolah tidak dapat melaksanakan kebijakan secara mandiri tanpa mengikuti sistem dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme SPMB belum berjalan secara optimal. Sebagian orang tua masih mengalami kesulitan memahami tahapan pendaftaran dan persyaratan administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan

implementasi bukan semata-mata terletak pada keberadaan aturan, tetapi pada bagaimana aturan tersebut dikomunikasikan kepada kelompok sasaran.

Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, hubungan antarorganisasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang konsisten agar standar kebijakan dapat dipahami secara sama oleh pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam kasus SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin, komunikasi antara sekolah dan masyarakat masih perlu diperkuat karena terdapat kesenjangan pemahaman pada pihak orang tua. Oleh sebab itu, sekolah tidak cukup hanya menyediakan informasi, tetapi perlu menggunakan bentuk sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat, seperti penjelasan langsung, panduan pendaftaran, maupun pendampingan saat proses pengunggahan dokumen.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa posisi sekolah dalam implementasi SPMB tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Semakin efektif sekolah menerjemahkan aturan ke dalam informasi yang mudah dipahami, semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada aspek karakteristik agen pelaksana, pihak SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan SPMB. Pihak sekolah melaksanakan proses penerimaan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan selama proses pendaftaran. Sekolah juga melakukan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat melalui sosialisasi, penyebaran brosur ke taman kanak-kanak, kegiatan perlombaan, serta pengenalan program dan visi sekolah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Sekolah tidak hanya menjalankan instruksi pemerintah, tetapi juga menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya upaya pendampingan kepada orang tua serta strategi sekolah untuk memperkenalkan keunggulan sekolah kepada masyarakat.

Namun, strategi tersebut sekaligus menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas dalam implementasi SPMB. Ketika sekolah harus melakukan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan murid berhadapan dengan realitas persaingan antarsekolah. Sekolah perlu beradaptasi dengan preferensi masyarakat yang tidak hanya mempertimbangkan akses berdasarkan domisili, tetapi juga mempertimbangkan fasilitas, program, dan citra sekolah.

Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana dalam penelitian ini dapat dipahami melalui kemampuan sekolah dalam menjalankan aturan sekaligus merespons kondisi lingkungan. Kemampuan adaptasi tersebut menjadi penting karena implementasi kebijakan berlangsung dalam lingkungan yang memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi implementasi SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin. Secara positif, sistem penerimaan yang dilakukan secara daring dan berdasarkan jalur yang telah ditentukan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti proses penerimaan secara lebih terbuka. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa

masyarakat masih memiliki preferensi terhadap sekolah tertentu yang dianggap memiliki fasilitas dan program pendidikan yang lebih baik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerataan akses belum sepenuhnya mampu menghilangkan pengaruh kondisi sosial masyarakat terhadap pilihan sekolah. Masyarakat tidak hanya mempertimbangkan apakah anak memperoleh kesempatan untuk mendaftar, tetapi juga mempertimbangkan kualitas layanan yang akan diterima setelah anak diterima di sekolah. Dengan demikian, akses terhadap sekolah dan preferensi terhadap sekolah merupakan dua persoalan yang berbeda.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, lingkungan sosial dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat mengenai sekolah unggulan dan kualitas fasilitas menjadi faktor yang memperkuat persaingan antarsekolah. Oleh karena itu, meskipun SPMB telah memberikan mekanisme penerimaan yang lebih terstruktur, ketimpangan kualitas antarsekolah tetap dapat memengaruhi distribusi peserta didik.

Temuan ini memberikan implikasi bahwa pencapaian pemerataan pendidikan membutuhkan intervensi yang lebih luas daripada sekadar mengatur mekanisme penerimaan murid. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kualitas layanan, fasilitas, program pendidikan, dan daya tarik sekolah dapat berkembang secara lebih merata sehingga masyarakat tidak hanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar, tetapi juga memiliki pilihan sekolah yang relatif setara dari sisi kualitas.

f. Disposisi Implementor

Pada aspek disposisi implementor, pihak pelaksana SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan. Implementor memahami tujuan pelaksanaan SPMB dan berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sikap tersebut terlihat dari kesiapan sekolah dalam melaksanakan sistem penerimaan berbasis daring serta kesediaan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung implementasi SPMB. Meskipun terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat dan persaingan antarsekolah, pihak sekolah tetap berupaya menjalankan kebijakan sesuai ketentuan sekaligus memberikan respons terhadap persoalan yang muncul di lapangan.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn, disposisi implementor berkaitan dengan pemahaman, penerimaan, dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, implementor di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin menunjukkan penerimaan terhadap kebijakan karena tetap menjalankan mekanisme SPMB dan berusaha membantu kelompok sasaran. Dengan demikian, hambatan utama implementasi bukan berasal dari penolakan pelaksana terhadap kebijakan, melainkan lebih banyak muncul dari faktor eksternal, terutama pemahaman masyarakat, persaingan antarsekolah, dan perbedaan kualitas sekolah.

g. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SPMB

Berdasarkan keenam aspek teori Van Meter dan Van Horn, implementasi SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin dapat dikategorikan telah berjalan secara prosedural, tetapi belum

sepenuhnya optimal secara substantif. Secara prosedural, sekolah telah mengikuti standar dan mekanisme penerimaan yang ditetapkan pemerintah, didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas teknologi, serta menunjukkan komitmen positif dalam menjalankan kebijakan.

Sementara itu, hambatan implementasi terutama terlihat pada aspek hubungan antarorganisasi dan lingkungan sosial. Sosialisasi yang belum optimal menyebabkan sebagian orang tua belum memahami mekanisme pendaftaran secara menyeluruh. Pada saat yang sama, preferensi masyarakat terhadap sekolah yang dianggap memiliki kualitas lebih baik menyebabkan tujuan pemerataan jumlah peserta didik belum sepenuhnya tercapai. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari kesesuaian pelaksanaan dengan aturan, tetapi juga perlu dilihat dari hasil yang muncul pada kelompok sasaran.

Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. SPMB telah berhasil menciptakan mekanisme penerimaan yang lebih terstruktur dan transparan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketimpangan preferensi masyarakat dan kualitas antarsekolah. Oleh karena itu, implementasi SPMB perlu didukung dengan penguatan sosialisasi, pendampingan masyarakat dalam proses pendaftaran, serta pemerataan kualitas sarana, program, dan layanan pendidikan antar sekolah. Upaya tersebut diperlukan agar tujuan SPMB tidak berhenti pada terciptanya prosedur penerimaan yang tertib, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui sistem penerimaan berbasis daring dengan jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Pelaksanaan tersebut telah memberikan keteraturan dan transparansi dalam proses penerimaan murid baru serta menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasi SPMB belum sepenuhnya mencapai tujuan pemerataan secara substantif. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kendala berupa rendahnya pemahaman sebagian orang tua terhadap mekanisme pendaftaran daring, kendala administrasi, persaingan dengan sekolah swasta, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan SPMB telah didukung oleh kejelasan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarpihak, karakteristik pelaksana yang mendukung, serta disposisi implementor yang positif. Akan tetapi, faktor lingkungan sosial dan persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah masih menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pemerataan.

Implikasi dari temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SPMB tidak cukup hanya ditentukan oleh tersedianya sistem penerimaan daring dan kejelasan jalur penerimaan. Kebijakan tersebut perlu didukung oleh pemerataan kualitas layanan pendidikan, peningkatan kesiapan masyarakat dalam menggunakan sistem digital, serta koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan SPMB perlu dipahami tidak hanya dari terlaksananya proses penerimaan sesuai prosedur, tetapi juga dari kemampuan kebijakan dalam memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin perlu meningkatkan sosialisasi SPMB secara lebih luas dan mudah dipahami masyarakat,

khususnya mengenai persyaratan, jalur penerimaan, tahapan pendaftaran, dan penggunaan sistem daring. Sosialisasi dapat dilakukan sebelum periode pendaftaran melalui sekolah dasar, taman kanak-kanak, media digital, serta layanan pendampingan bagi orang tua yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas program pendidikan antar sekolah negeri agar tidak terjadi kesenjangan daya tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tertentu. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPMB untuk mengidentifikasi kendala teknis, administratif, maupun sosial yang muncul pada setiap periode penerimaan.

Bagi SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin, peningkatan efektivitas SPMB dapat dilakukan melalui penguatan layanan informasi dan pendampingan pendaftaran bagi orang tua, terutama bagi calon murid yang mengalami kesulitan menggunakan sistem daring. Sekolah juga perlu mempertahankan dan mengembangkan strategi pengenalan sekolah melalui kerja sama dengan taman kanak-kanak di sekitar lingkungan sekolah, penyebaran informasi mengenai program sekolah, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan calon murid, serta penguatan program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut perlu dilakukan bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah pendaftar, tetapi untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan citra sekolah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi SPMB di SDN Kebun Bunga 6 Banjarmasin dapat dinilai berjalan cukup baik pada aspek prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek substantif, khususnya dalam pemerataan kualitas sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengurangan kesenjangan preferensi antarsekolah. Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi faktor penting agar pelaksanaan SPMB tidak hanya menghasilkan proses penerimaan murid yang tertib dan transparan, tetapi juga mampu mendukung tujuan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azza, N. F., Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 4(2), 362–365.
- Kholifah, E. P., Setiawan, F., & Fitri, N. L. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 4(2), 164–174.
- Kussetyaningsih, R. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI PADA JENJANG SMP NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3), 243–255. <https://doi.org/10.21831/SAKP.V9I3.17204>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam *Publik*. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Muhardi, M. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4), 478–492.

- Putra, C. G. A. K., Sulandari, S., Suastini, N. L. P., Astuti, N. K. S., & Rahayu, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar No. 6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 73–82.
- Rahmah, A. N., Farkhan, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921–1928.
- Rohmah, S. (2020). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Journal Education Management*, 1(1), 25–34.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, S., Martak, Y. F., & Insani, R. M. N. (2025). Has the New Student Admission Policy Achieved Its Intended Goals? A Descriptive Analysis. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 18(2). <https://doi.org/10.24832/JPKP.V18I2.1255>
- Sedarmayanti. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (Cetakan ke-5). Jakarta: Refika Aditama.
- Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan Di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisi dan Problematikanya. *Jurnal Niara*, 18(2), 538–550.
- Subarsono. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sutaryo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sutrisno, H. (2016). *Statistik Jilid II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Wardani, A. R., Setiawan, F., Rifki, M., Dinulloh, N. N., Maulana, I. A., Zahra, N., Rizkilla, H. A., & Khiyaroh, N. (2022). Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 88–93.
- Yunita, A., Putra, W. S., & Anggreny, D. (2023). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 652–657.

Zen, Z. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Kencana.